

DSI – KEBIJAKAN EKSPOR 1 PINTU: SUMBER DEvisa atau POTENSI BOTTLENECK BARU?

Published on 29 May 2026

LATAR BELAKANG

Pemerintah tengah menyiapkan implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui **PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk tiga komoditas strategis tahap awal, yaitu batu bara, CPO, dan ferroalloy**. Berdasarkan informasi terbaru, fase transisi dimulai pada 1 Juni 2026, sementara implementasi penuh ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2027. Secara konsep, kebijakan ini merupakan bagian dari **upaya pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap aliran komoditas dan devisa hasil ekspor**.

Pemerintah menilai Indonesia sebagai salah satu eksportir komoditas terbesar dunia belum memperoleh manfaat devisa yang optimal akibat potensi under-invoicing, transfer pricing, serta devisa hasil ekspor yang tidak seluruhnya masuk dan bertahan dalam sistem keuangan domestik.

Kebijakan ini juga berjalan seiring dengan penguatan aturan **DHE SDA**. Jika DHE SDA berfungsi mengontrol aliran uangnya, maka DSI berupaya mengontrol aliran barang, pricing visibility, dan data ekspornya. **Tujuan akhirnya** adalah memperkuat cadangan devisa, meningkatkan transparansi ekspor, serta membantu stabilisasi Rupiah yang melemah hingga sekitar menembus 17800 / USD.

BENEFITS

Secara teori, kebijakan ini berpotensi memberikan beberapa manfaat bagi perekonomian nasional.

Pertama, meningkatkan transparansi ekspor dan mengurangi potensi under-invoicing. Pemerintah akan memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap volume, harga, dan aliran devisa ekspor komoditas strategis. Under-invoicing sendiri merupakan praktik ketika nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga transaksi yang sebenarnya, sehingga sebagian devisa berpotensi tidak tercatat secara penuh dalam sistem keuangan domestik. (Sebagai ilustrasi, apabila harga batu bara yang dijual ke pembeli luar negeri sebenarnya USD 100 / ton namun yang tercatat dalam dokumen ekspor hanya USD 70 / ton, maka terdapat selisih USD 20 / ton yang tidak tercermin secara penuh dalam perhitungan devisa, pajak, maupun royalti negara). Akibatnya, penerimaan negara dan manfaat devisa bagi perekonomian nasional menjadi tidak optimal.

Kedua, meningkatkan kontrol dan transparansi terhadap perdagangan komoditas strategis nasional. Selama ini pemerintah lebih banyak berperan sebagai regulator yang mengawasi dari belakang, sementara DSI berpotensi memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap volume, harga, tujuan ekspor, hingga aliran devisa dari komoditas strategis. Bahkan dalam beberapa pernyataan terbaru, pemerintah juga mewacanakan integrasi data ekspor yang selama ini berada di sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam ekosistem DSI dan Danantara untuk memperkuat monitoring dan tata kelola ekspor. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi bahwa Direktorat Bea dan Cukai akan dilebur atau dihapus sepenuhnya, meskipun beberapa fungsi pengawasan, pelaporan, dan pemungutan ekspor disebut berpotensi semakin terintegrasi dengan sistem DSI berbasis digital dan AI. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat meminimalkan potensi kebocoran devisa, meningkatkan akurasi penerimaan negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola komoditas yang menjadi tulang punggung ekspor nasional.

Ketiga, meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis. Model seperti ini sebenarnya bukan hal baru di negara berbasis komoditas. Malaysia memiliki kontrol yang cukup kuat terhadap industri palm oil melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), kebijakan kuota, levy, dan instrumen ekspor lainnya untuk menjaga stabilitas pasokan serta kepentingan industri nasional. Saudi Arabia mengontrol ekspor minyak melalui Saudi Aramco, Chile memiliki dominasi negara melalui Codelco untuk copper, sementara China menggunakan export quota, export licensing, dan state-linked trading firms untuk mengelola rare earth dan mineral strategis. Tujuan akhirnya relatif sama, yaitu memperkuat posisi tawar negara, menjaga penerimaan devisa, dan memastikan komoditas strategis dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi perekonomian domestik.

Keempat, memperkuat konsep resource sovereignty atau kedaulatan ekonomi, yaitu memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri dibanding mengalir keluar negeri.

CHALLENGES

Tantangan terbesar kebijakan ini bukan terletak pada tujuannya, melainkan pada **implementasinya**.

Pasar saat ini berada dalam kondisi yang cukup sensitif. Foreign outflow dari pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun hingga akhir Mei 2026, sementara Rupiah mengalami tekanan yang cukup besar bahkan telah mencapai level >17800 / USD yang bahkan MenKeu Purbaya katakan "tidak masuk akal". Dalam situasi seperti ini, setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan **policy risk**.

Kekhawatiran pasar meningkat apabila DSI berkembang menjadi bentuk intervensi yang lebih agresif ; bukan sekedar administrative checking lagi, melainkan jadi seperti:

- Sole exporter atau mandatory selling channel
- Pengendalian pricing oleh negara
- Pembatasan buyer tertentu
- Pengawasan pembayaran yang terlalu ketat
- Peninjauan ulang kontrak existing secara agresif

Jika skenario tersebut terjadi, pasar akan mulai mempertanyakan:

- Transparansi pricing mechanism
- Governance dan potensi conflict of interest
- Tambahan birokrasi dan kecepatan pengambilan keputusan
- Kompetensi trading dan risk management
- Execution capability institusi yang menjalankan sistem

Perdagangan komoditas global merupakan bisnis yang sangat cepat, kompleks, dan highly relationship-driven. Buyer internasional sangat sensitif terhadap kepastian kontrak, kecepatan shipment, fleksibilitas pricing, reliability pembayaran, dan efisiensi administrasi. Jika proses perdagangan menjadi lebih birokratis, buyer dapat mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain.

Selain itu, muncul pertanyaan penting mengenai **benchmark harga**. Misalnya pada batu bara, pemerintah menggunakan HBA sebagai referensi, sementara transaksi aktual di pasar sangat dipengaruhi kalori, moisture, sulfur, kualitas produk, dan benchmark internasional seperti Newcastle. Karena itu, definisi under-invoicing harus dijelaskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian interpretasi.

OPINI KIWOOM RESEARCH

KIWOOM RESEARCH melihat bahwa kebijakan ekspor satu pintu bukan otomatis kebijakan yang buruk. Dari sudut pandang negara, langkah ini memiliki logika yang kuat untuk memperkuat devisa, meningkatkan transparansi ekspor, menutup potensi kebocoran ekonomi, dan mendukung stabilitas Rupiah.

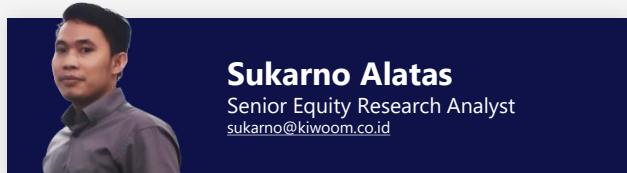
Namun dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor.

Pertanyaan terbesar pasar saat ini bukan lagi "apa tujuan kebijakannya", melainkan "siapa yang menjalankan, seberapa transparan mekanismenya, dan seberapa efisien implementasinya".

Jika DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan monitoring devisa, pasar kemungkinan masih dapat beradaptasi. Namun apabila berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap pricing, buyer, pembayaran, dan kontrak perdagangan komoditas, maka investor global dapat mulai melihat Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah *resource nationalism*.

Pada akhirnya, market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan *bottleneck baru* bagi dunia usaha. Dalam kondisi Rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara.

Kiwoom Research Team



HEAD OFFICE

Treasury Tower 27th Floor Unit A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28,
Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Tel : (021) 5010 5800

Fax : (021) 5010 5820

Email : cs@kiwoom.co.id

PT Kiwoom Sekuritas Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK)

OTHER DISCLOSURES

All Kiwoom's research reports made available to clients are simultaneously available on our own website <http://www.kiwoom.co.id/>. Not all research content is redistributed, e-mailed or made available to third-party aggregators. For all research reports available on a particular stock, please contact your sales representative. Any data discrepancies in this report could be the result of different calculations and/or adjustments.

DISCLAIMER

This report has been prepared and issued by PT Kiwoom Sekuritas Indonesia. Information has been obtained from sources believed to be reliable but Kiwoom Securities do not warrant its completeness or accuracy. Forward-looking information or statements in this report contain information that is based on forecast of future results, estimates of amounts not yet determinable, assumptions, and therefore involve known and unknown risks and uncertainties which may cause the actual results, performance or achievements of their subject matter to be materially different from current expectations. To the fullest extent allowed by law, PT Kiwoom Sekuritas Indonesia shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses, loss of profits, damages, costs or expenses incurred or suffered by any person or organization arising from reliance on or use of any information contained on this report. The information that we provide should not be construed in any manner whatsoever as, personalized advice. No mention of a particular security in this report constitutes a recommendation to buy, sell or hold that or any security, or that any particular security, portfolio of securities, transaction or investment strategy is suitable for any specific person. This report is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced by, further distributed to or published in whole or in part by, any other person.